

BAB 1

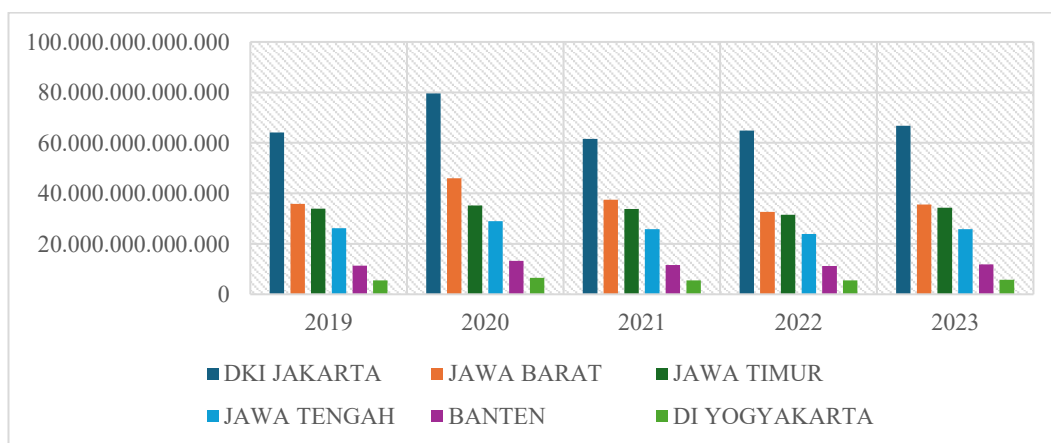
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah mendapatkan otoritas mengurus wilayahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan hak dalam mengambil keputusan terkait kepentingan lokal. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara umum menerangkan mekanisme atas diberikannya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Otonomi daerah bukan berarti kekuasaan tanpa batas, melainkan kebebasan dengan penuh tanggung jawab, dimana pemerintah pusat bertindak sebagai pengawasan agar pelaksanaan otonomi tidak menyimpang.

Pelaksanaan otonomi daerah mendorong terjadinya desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan pengelolaan keuangan daerah dari pusat ke daerah. Desentralisasi ini diharapkan meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat kemandirian fiskal daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui sistem ini, pemerintah daerah menerima dana transfer dari APBN yang disesuaikan dengan aturan agar pengelolaan keuangan bisa lebih berkelanjutan sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat (Ningsih et al., 2023).

Penilaian terhadap belanja daerah dalam APBN merupakan aspek yang sangat penting karena mencerminkan prioritas dan efektivitas penggunaan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) meminta agar pemerintah daerah meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih rendah untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Belanja daerah merupakan semua biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan kualitas publik. Oleh karena itu, pengalokasian belanja daerah perlu disesuaikan dengan sasaran pembangunan yang jelas agar realisasi belanja menggambarkan pengelolaan anggaran yang optimal. Sebagai gambaran awal mengenai kondisi belanja daerah, dapat dilihat pada Gambar 1.1 yang menyajikan perbandingan Belanja Daerah Provinsi di Pulau Jawa untuk periode 2019-2023. Data ini memperlihatkan pola realisasi belanja daerah antarprovinsi selama periode tersebut.



Sumber: DJPK Kemenkeu (diolah penulis, 2024)

Gambar 1.1
Belanja Daerah Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2023

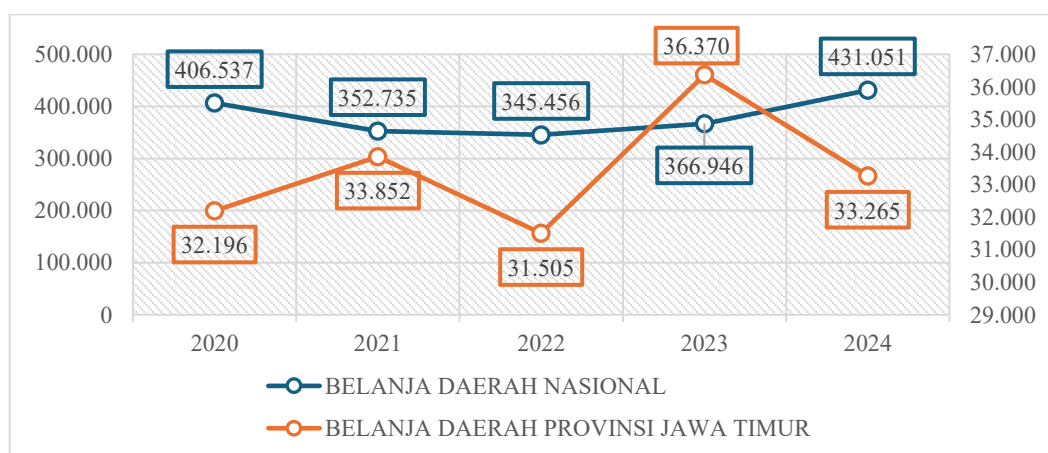
Pulau Jawa terdiri dari enam provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DI Yogyakarta. Belanja daerah provinsi-provinsi di Pulau Jawa selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika fiskal yang menarik dan relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Dari grafik di atas, terlihat DKI Jakarta selalu menduduki posisi teratas sebagai provinsi dengan nominal belanja daerah terbesar, di ikuti oleh Jawa Barat di peringkat kedua, dan Jawa Timur yang bertahan di peringkat ketiga. Analisis perbandingan antar provinsi mengungkap pola yang berbeda dalam pengelolaan belanja daerah.

DKI Jakarta meskipun konsisten menjadi yang tertinggi, menunjukkan fluktuasi signifikan dengan puncak di tahun 2020 sebesar Rp 79,61 triliun kemudian turun drastis menjadi Rp 61,62 triliun di tahun 2021. Provinsi Jawa Barat sebagai peringkat kedua mengalami penurunan bertahap dari Rp 45,99 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 32,64 triliun di tahun 2022, namun menunjukan pemulihan di tahun 2023 menjadi Rp 35,51 triliun. Provinsi Jawa Timur sebagai peringkat ketiga menjadi provinsi yang menunjukan pola lebih stabil dibandingkan kedua provinsi atasnya dengan rentang belanja yang tidak terlalu lebar, yaitu antara Rp 31,51 triliun di tahun 2022 hingga Rp 35,20 triliun di tahun 2020.

Ketiga provinsi lainnya yaitu Jawa Tengah, Banten, dan DI Yogyakarta menunjukan tren belanja yang lebih stabil dengan fluktuasi minimal, meskipun nominalnya lebih kecil dibandingkan tiga provinsi utama. Stabilitas fiskal Jawa Timur dalam konteks ini menjadi fenomena yang patut dikaji lebih mendalam, mengingat posisinya sebagai provinsi dengan ekonomi terbesar ketiga di Jawa namun dengan pola belanja terkendali dibandingkan dengan DKI Jakarta dan Jawa

Barat. Fenomena ini mendukung relevansi Jawa Timur sebagai objek penelitian untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja belanja daerah serta strategis pengelolaan fiskal yang efektif di Provinsi Jawa Timur dengan kapasitas ekonomi besar namun belanja yang stabil.

Belanja daerah secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga harus dialokasikan dengan sebaik mungkin. Alokasi belanja daerah yang lebih diutamakan untuk fasilitas publik akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan daerah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh alokasi belanja pemerintah, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Selanjutnya, Gambar 1.2 menyajikan pola perkembangan belanja daerah nasional dan Provinsi Jawa Timur periode 2020-2024, yang digunakan untuk melihat kecenderungan tren belanja daerah dari waktu ke waktu.



Sumber: DJPK Kemenkeu dan BPS Jawa Timur (diolah penulis, 2025)

Gambar 1.2

Perkembangan Belanja Daerah Nasional dan Belanja daerah Provinsi Jawa Timur 2020-2024

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Belanja Daerah Nasional dan Provinsi Jawa Timur selama periode 2020 hingga 2024 memperlihatkan dinamika yang menarik dan berbeda. Belanja daerah nasional mengalami fluktuasi signifikan, mulai dari Rp 345,456 triliun pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp 431,05 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, belanja daerah di Provinsi Jawa Timur menunjukkan fluktuasi, berada di kisaran antara Rp 31,51 triliun hingga Rp 36,37 triliun.

Dalam lima tahun terakhir, belanja daerah Jawa Timur mengalami dua kali tren positif dan tiga kali tren negatif. Tren positif pertama terjadi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 5 persen dan total belanja daerah sebesar Rp 33,8 triliun, meningkat sekitar Rp 1,5 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 32,2 triliun. Pada tahun 2022, belanja daerah mengalami penurunan sebesar 7 persen menjadi Rp 31,5 triliun. Tren positif tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan total belanja daerah sebesar Rp 36,3 triliun dan peningkatan sebesar 15,5 persen. Namun, pada tahun 2024 belanja daerah Jawa Timur kembali turun sebesar 8,5 persen atau dengan selisih Rp 3 triliun dari tahun sebelumnya.

Peningkatan pertumbuhan belanja tertinggi pada tahun 2023 dengan total belanja sebesar Rp 34,4 triliun meningkat Rp 2,9 triliun dari tahun sebelumnya, dan penurunan terendah pada tahun 2024 dengan total belanja sebesar Rp 33,2 triliun dengan minus 3,5 persen atau sekitar Rp 1,2 triliun. Kontribusi Jawa Timur terhadap belanja daerah nasional rata-rata sebesar 8,84 persen selama periode 2020-2024, dengan puncak 9,60 persen pada tahun 2021. Fenomena fluktuasi belanja daerah Jawa Timur yang tidak selalu sejalan dengan tren nasional, ditambah dengan

kontribusi yang signifikan menjadi alasan kuat pemilihan Jawa Timur sebagai objek penelitian untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah.

Pemerintah daerah akan menggunakan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan untuk membiayai pengeluaran daerah berupa belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah setiap daerah berbeda, tergantung dari kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Sebagai sumber pendanaan utama, perkembangan pendapatan asli daerah disajikan pada Gambar 1.3 yang menggambarkan pola perkembangan pendapatan asli daerah nasional dan Provinsi Jawa Timur selama periode 2020-2024.



Sumber: DJPK Kemenkeu dan BPS Jawa Timur (diolah penulis, 2025)

Gambar 1.3

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Nasional dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2020-2024

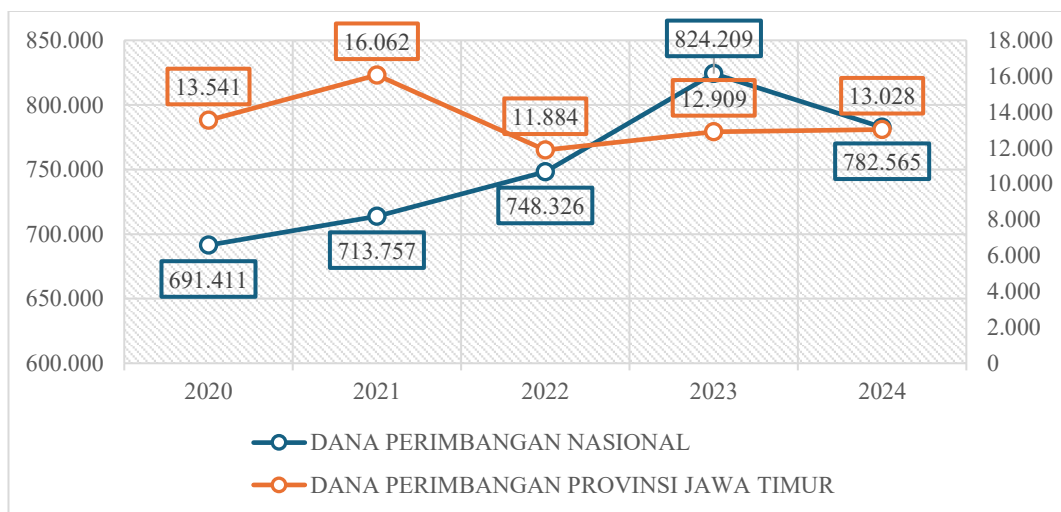
Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pendapatan Asli Daerah nasional dan Provinsi Jawa Timur selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Pendapatan asli daerah nasional mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 148,71 triliun akibat dampak pandemi, namun kembali pulih dan naik hingga mencapai Rp 210,13 triliun pada tahun 2024.

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia juga mengalami pola yang mirip. Berdasarkan Grafik di atas, terdapat penurunan Pendapatan Asli Daerah hanya pada tahun 2020. Setelah mengalami penurunan pada 2020 akibat pandemi, pendapatan asli daerah Jawa Timur kembali tumbuh stabil hingga mencapai puncaknya pada 2023 sebesar Rp 22,31 triliun. Pendapatan Asli Daerah berkontribusi pada pembiayaan kebutuhan daerah dapat menjadi acuan untuk menilai bagaimana kinerja keuangan daerah. Apabila lebih besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah daripada pendanaan transfer guna mendanai belanja daerah, maka kinerja keuangan tersebut dinilai baik. Selaras dengan tingginya daerah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, peningkatan juga akan dialami oleh belanja daerah. Penelitian sebelumnya seperti Rina Humaira, (2025) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2018-2022.

Perbedaan kemampuan keuangan di setiap daerah dapat menyebabkan ketimpangan fiskal. Maka dari itu untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat perlu berperan untuk memastikan penyelenggaraan otonomi daerah dapat berlangsung secara efektif dan efisien, diantaranya memberikan bantuan transfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan. Menurut Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2023, dana perimbangan ini bertujuan untuk menciptakan

keadilan dalam distribusi sumber daya keuangan antara pusat dan daerah serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Sebagai gambaran mengenai alokasi dana perimbangan, dapat dilihat pada Gambar 1.4 menyajikan pola perkembangan dana perimbangan nasional dan dana perimbangan Provinsi Jawa Timur selama periode 2020-2024.



Sumber: DJPK Kemenkeu dan BPS Jawa Timur (diolah penulis, 2025)

Gambar 1.4

Perkembangan Dana Perimbangan Nasional dan Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur 2020-2024

Berdasarkan data realisasi dana perimbangan nasional dan Jawa Timur terdapat fluktuatif nilai selama 2020-2024. Dana perimbangan nasional pada tahun 2020 turun menjadi Rp 691,41 triliun, kemudian meningkat hingga mencapai puncaknya Rp 824,21 triliun pada tahun 2023. Dana perimbangan Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2022. Nilai dana perimbangan mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar Rp 16,06 triliun. Tapi pada tahun 2022, dana perimbangan mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 11,88 triliun.

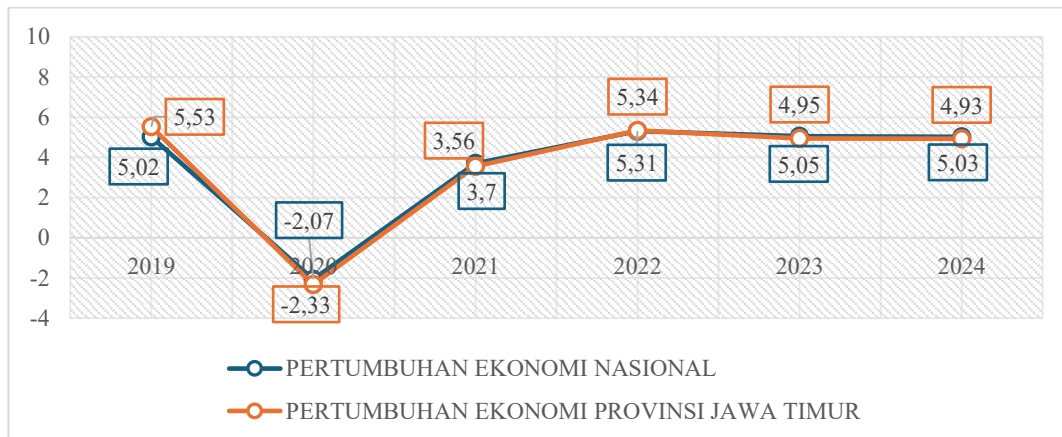
Kontribusi dana perimbangan Jawa Timur terhadap total nasional berkisaran antara 1,86 persen hingga 2,3 persen dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2021.

Alokasi pemerintah pusat dalam memberikan transfer dana dapat menjadikan daerah memiliki ketergantungan sehingga bisa memicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah hasil mengeksplorasi potensi. Namun tidak dipungkiri bahwa adanya alokasi dana berasal APBN bertujuan demi desentralisasi, diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan keuangan antar daerah sehingga dapat mendanai keperluan pengeluaran daerahnya. Sejalan dengan penelitian Afli Audryna et al. (2025) menunjukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2023. Meningkatnya dana perimbangan dapat mendanai pelaksanaan pemerintah, sehingga implikasi belanja daerah mengalami peningkatan apabila dana perimbangan meningkat juga.

Pertumbuhan ekonomi sangatlah penting dalam memperkuat keuangan daerah. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka pemerintah akan meningkatkan belanja daerah untuk menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Tercapainya target realisasi belanja daerah dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi (Mahdawi et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi menunjukan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi daerah diprosikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB yaitu total atas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan. Tingginya nilai PDRB menunjukkan meningkatnya kapasitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan rendahnya PDRB mencerminkan melemahnya aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat (Fajri, 2021).

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia menjadi objek yang menarik untuk diteliti terkait kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Potensi ekonomi yang besar dan beragam mulai dari sektor pertanian, industri, hingga pariwisata menuntut Jawa Timur untuk dapat mengelola keuangan daerahnya secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain aspek fiskal, kinerja ekonomi daerah juga menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk menggambarkan hubungan antara kondisi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, Gambar 1.5 menyajikan data tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Timur selama periode 2020-2024. Penyajian ini digunakan untuk mengamati arah pergerakan dan dinamika pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.



Sumber: DJPK Kemenkeu dan BPS Jawa Timur (diolah penulis, 2025)

Gambar 1.5

Perkembangan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2019-2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur selama periode 2019-2024 menunjukkan pola yang relatif sejalan. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,02 persen, sedangkan Jawa Timur lebih tinggi yaitu 5,53 persen. Sebelum tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam akibat pandemi, di mana pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menjadi lebih rendah dari pada nasional dengan kontraksi sebesar -2,33 persen dibandingkan -2,07 persen nasional. Pemulihan ekonomi terjadi pada tahun 2022, saat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melonjak hingga 5,34 persen menandakan fase pemulihan yang kuat setelah pandemi. Pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 4,95 persen dan tahun 2024 juga mengalami penurunan namun masih tergolong stabil dengan pertumbuhan ekonomi di angka 4,93 persen.

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan daerah, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan antara kemampuan fiskal daerah dengan alokasi belanja daerah. Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendistribusikan pendapatan yang lebih merata. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin besar pula potensi pendapatan asli daerah yang dapat dihasilkan. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung memiliki aktivitas ekonomi yang lebih produktif sehingga pendapatan asli daerah yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dalam meningkatkan belanja daerah. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi daerah terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, sangatlah bergantung pada dana perimbangan (Pangestu et al., 2022).

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi juga dapat memengaruhi efektivitas pemanfaatan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Sebagai transfer dari pemerintah pusat, dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dan mendukung pemerataan pembangunan. Dengan alokasi yang tepat, dana perimbangan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan strategis, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Infrastruktur yang memadai, misalnya, dapat mendorong efisiensi logistik, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan membuka akses ke pasar yang lebih luas, yang pada akhirnya mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan daerah (Kusharsanto et al., 2021).

Pada daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, dana perimbangan cenderung lebih efektif digunakan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, pada daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah, dana perimbangan lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin sehingga pengaruhnya terhadap peningkatan belanja daerah menjadi kurang optimal. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah.

Berdasarkan penelitian Tavares et al., (2023) di Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi memiliki peran ganda dalam memoderasi hubungan variabel fiskal dengan belanja daerah. Pertumbuhan ekonomi justru memperlemah hubungan pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah, namun sebaliknya memperkuat hubungan retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi dapat menentukan kuat atau lemahnya pengaruh variabel fiskal terhadap belanja daerah, tergantung pada kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola sumber pendapatannya.

Berbeda dengan hasil penelitian Irwan, Mursalin dan Nurwanah (2022) di Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan bahwa hasil uji moderasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, sementara pada pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi dapat berperan sebagai variabel moderasi tetapi dengan arah negatif. Perbedaan hasil antara kedua penelitian tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi temuan terkait bagaimana peran

pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi hubungan variabel fiskal terhadap belanja daerah. Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan untuk memperdalam pemahaman mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi, khususnya dalam konteks Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik fiskal dan ekonomi unik serta kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2020-2024)".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa pertanyaan mengenai gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024?

3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024?
4. Bagaimana peran Pertumbuhan Ekonomi dalam memoderasi pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.
4. Untuk mengetahui peran Pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan antara lain:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Tidak hanya itu, penulis juga berharap supaya hasil dari penelitian ini dapat mendorong berkembangnya penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya terutama dibidang Akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Membawa wawasan serta pengetahuan penulis mengenai pengaruh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah rujukan dalam menetapkan suatu kebijakan keuangan daerah serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan dijadikan sebagai pembanding bagi penelitian lain dalam penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data diperoleh dari sumber-sumber resmi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan oleh website resmi Badan Pusat Statistik Keuangan (BPS) www.bps.go.id dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia www.djpk.kemenkeu.go.id.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan tersebut disajikan pada Tabel 1.1 mengenai jadwal penelitian.

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

[illegible]